

Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Penghapusan Sistem Zonasi dalam PPDB

Siti Zulaika¹, Muhamad Ammar Muhtadi², Rival Pahrijal³

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan sitizulaika@ipdn.ac.id

²Universitas Nusa Putra dan muhamad.ammar_mn19@nusaputra.ac.id

³Universitas Nusa Putra dan rivalpahrijal@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jan, 2025

Revised Jan, 2025

Accepted Jan, 2025

Kata Kunci:

Sistem Zonasi, PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), Persepsi Masyarakat, Pemerataan Pendidikan

Keywords:

Zoning System, PPDB (New Student Admission), Community Perception, Education Equity

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap rencana penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), proses penerimaan siswa baru di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari 10 informan melalui wawancara semi-terstruktur, dan dianalisis menggunakan perangkat lunak NVIVO. Hasil penelitian menunjukkan adanya persepsi yang beragam mengenai sistem zonasi. Sementara beberapa informan memuji pendekatannya yang adil terhadap akses sekolah, yang lain mengkritik keterbatasannya, terutama terkait pilihan pendidikan. Sikap masyarakat terhadap penghapusan sistem zonasi juga terbagi; para pendukung berpendapat bahwa pilihan sekolah harus ditambah, sementara para penentang khawatir akan memperburuk ketidaksetaraan. Para peserta menyarankan sistem penerimaan siswa baru dan peningkatan kualitas pendidikan di semua sekolah sebagai alternatif. Studi ini menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang dalam mereformasi proses PPDB untuk memastikan akses yang adil terhadap pendidikan bagi semua siswa.

ABSTRACT

This research explores people's perceptions of the planned abolition of the zoning system in Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Indonesia's new student admission process. Using a qualitative approach, data was collected from 10 informants through semi-structured interviews, and analyzed using NVIVO software. The results showed mixed perceptions of the zoning system. While some informants praised its fair approach to school access, others criticized its limitations, especially regarding educational choices. Attitudes towards abolishing the zoning system were also divided; supporters argued that school choice should be increased, while opponents were concerned that it would exacerbate inequalities. Participants suggested a new admission system and improved education quality in all schools as alternatives. This study highlights the need for a balanced approach in reforming the PPDB process to ensure equitable access to education for all students.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Siti Zulaika

Institution: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Email: sitizulaika@ipdn.ac.id

1. PENDAHULUAN

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Indonesia bertujuan mengatasi kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas dengan memprioritaskan siswa berdasarkan kedekatannya dengan sekolah, serta mempromosikan inklusivitas dan kesempatan adil bagi berbagai latar belakang sosial-ekonomi. Meskipun efektif dalam mengurangi kesenjangan akses, terutama untuk siswa ekonomi lemah, sistem ini memicu perdebatan karena hasil yang bervariasi dan tantangan dalam pelaksanaannya (Susanto et al., 2024). Kebijakan ini juga meningkatkan kepuasan masyarakat dan membantu siswa di daerah terpencil mendapatkan akses lebih baik (Hermawan & Hakim, 2024), serta berkontribusi pada pengurangan ketimpangan kualitas pendidikan, seperti yang terlihat dengan peningkatan nilai Ujian Nasional di DKI Jakarta (Nurfakihiswara et al., 2024). Namun, sistem ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu, dengan banyak yang masih kesulitan mengakses sekolah negeri (Susanto et al., 2024). Penerapan batas zonasi juga menimbulkan kesenjangan, seperti kekurangan murid di beberapa sekolah akibat ketidakcocokan data pendidikan dan populasi (Rofidah et al., 2024). Kualitas pendidikan masih belum merata, dengan kesenjangan fasilitas dan kualitas guru yang menjadi kendala signifikan (Musyadad et al., n.d.). Untuk mengatasi masalah ini, penggunaan Algoritma Genetika disarankan untuk mengoptimalkan zonasi dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas sekolah (Susanto et al., 2024), serta pemerataan sumber daya agar sistem zonasi dapat mencapai hasil yang diharapkan (Musyadad et al., n.d.).

Perdebatan tentang penghapusan sistem zonasi di dunia pendidikan mencerminkan pandangan berbeda tentang efektivitasnya. Kritikus berpendapat bahwa sistem zonasi memperburuk ketidaksetaraan geografis dan membatasi akses ke sekolah berkualitas, terutama bagi kelompok terpinggirkan, sementara pendukungnya percaya bahwa penghapusan zonasi dapat mendorong persaingan dan memungkinkan siswa memilih sekolah berdasarkan prestasi, bukan lokasi. Kebijakan zonasi terbukti berdampak tidak proporsional terhadap siswa minoritas, membatasi akses mereka ke peluang pendidikan yang lebih berkualitas (Asson, 2024). Di Indonesia, sistem zonasi belum efektif menyetarakan akses pendidikan, karena jumlah kursi di sekolah negeri sering tidak sesuai dengan kebutuhan (Sulistiyosari et al., 2023). Penghapusan zonasi dapat meningkatkan kompetisi di antara siswa, mendorong mereka mengejar keunggulan akademis berdasarkan kemampuan, bukan kendala geografis (Madjid, 2023; Tasyirifiah & Pitaloka, 2023). Kritikus juga berpendapat bahwa sistem zonasi mengurangi motivasi siswa, karena kedekatan jarak dengan sekolah dapat menimbulkan rasa puas diri (Tasyirifiah & Pitaloka, 2023). Sistem zonasi juga telah menyebabkan penurunan kualitas akademik di beberapa sekolah karena mereka harus menerima siswa dengan tingkat motivasi dan kinerja yang berbeda-beda (Sulistiyosari et al., 2023). Perdebatan ini mencerminkan perlunya pendekatan seimbang yang mempertimbangkan akses yang adil dan peningkatan standar akademik (Rabbani et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terkait usulan penghapusan sistem zonasi dalam PPDB. Dengan mengeksplorasi perspektif berbagai pemangku

kepentingan, termasuk orang tua, pendidik, dan tokoh masyarakat, penelitian ini berupaya memahami alasan yang mendasari dukungan atau penolakan terhadap perubahan kebijakan tersebut. Temuan-temuan ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana masyarakat memandang potensi konsekuensi dari penghapusan sistem zonasi dan akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak kebijakan tersebut terhadap akses dan pemerataan pendidikan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Sistem Zonasi dalam Pendidikan*

Sistem zonasi dalam kebijakan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dengan menempatkan siswa di sekolah-sekolah berdasarkan kedekatan geografis, bukan prestasi akademik atau status sosial ekonomi, untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta mempromosikan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif. Kebijakan zonasi dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi mereka (Susanto et al., 2024) dan mencegah keluarga kaya memonopoli tempat di sekolah-sekolah berkinerja tinggi (Musyadad et al., n.d.). Meskipun demikian, sistem ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan siswa dari kalangan kurang mampu yang mungkin masih menghadapi hambatan untuk mendaftar (Susanto et al., 2024), dan beberapa siswa tidak dapat bersekolah di sekolah terdekat karena jarak yang jauh, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan orang tua siswa (Hasbullah & Anam, 2019). Kebijakan zonasi juga telah menghasilkan jumlah siswa yang lebih beragam di sekolah, mencerminkan demografi masyarakat setempat, termasuk latar belakang ekonomi dan etnis (Hendrik et al., 2024).

2.2 *Kritik terhadap Sistem Zonasi*

Sistem zonasi dalam pendidikan, meskipun dimaksudkan untuk mendorong keadilan, sering kali menimbulkan konsekuensi negatif yang tidak diharapkan, terutama terkait akses ke lembaga pendidikan yang berkualitas. Penelitian menunjukkan bahwa siswa di daerah yang kurang berkembang sering kali bersekolah di sekolah dengan sumber daya yang kurang memadai, memperparah kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Fu & Talib, 2024). Selain itu, sistem zonasi belum secara efektif meningkatkan akses bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi, karena banyak yang kesulitan untuk mendaftar di sekolah berkualitas (Susanto et al., 2024). Para orang tua mengungkapkan frustrasi mereka karena kebijakan zonasi yang memprioritaskan kedekatan geografis, sehingga membatasi akses anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik (Musyadad et al., n.d.), dan perubahan batas zona kehadiran dapat secara tidak proporsional mempengaruhi kelompok terpinggirkan, memperburuk ketidaksetaraan yang ada (Asson, 2024). Selain itu, sistem zonasi secara tidak sengaja dapat mengurangi keberagaman di sekolah karena siswa dari latar belakang sosial-ekonomi yang serupa cenderung mengelompok (Rupiarsieh, 2024).

2.3 *Persepsi Publik terhadap Kebijakan Pendidikan*

Persepsi publik secara signifikan mempengaruhi keberhasilan reformasi pendidikan, khususnya sistem zonasi di Indonesia. Para pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan pendidik, mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait fleksibilitas sistem dan keselarasannya dengan aspirasi akademis siswa. Banyak orang tua yang menganggap sistem zonasi bermanfaat untuk memastikan akses ke pendidikan yang berkualitas, namun mereka juga mengungkapkan kekhawatiran akan kekakuannya dan hilangnya sekolah-sekolah favorit yang mereka yakini dapat menjamin masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka (Laily et al., 2024). Para guru melaporkan perasaan yang beragam; sementara beberapa mengakui berkurangnya kesenjangan pendidikan, yang lain menekankan bertahannya gengsi sekolah favorit, yang mempersulit penerimaan sistem zonasi (Arlinwibowo et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa sentimen masyarakat terhadap sistem zonasi terpolarisasi, dengan umpan balik negatif yang signifikan terkait implementasinya, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara niat kebijakan dan pengalaman masyarakat (Rifai & Imelda, 2024). Kebijakan yang dianggap adil dan transparan mendapatkan lebih banyak dukungan dari masyarakat, sementara kebijakan yang dianggap tidak adil mendapatkan penolakan (Fiddini et al., 2023; Musadad & Purwanta, 2023).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, yang cocok untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks di mana memahami pengalaman subjektif, perspektif, dan motivasi individu sangat penting. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif efektif untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana individu memahami dunia dan pengalaman mereka. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan persepsi yang rinci tentang potensi dampak penghapusan sistem zonasi dari berbagai anggota masyarakat.

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, sebuah metode pengumpulan data kualitatif yang umum digunakan, untuk memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi pandangan partisipan sambil memastikan bahwa semua topik utama yang terkait dengan pertanyaan penelitian telah dibahas. Format wawancara semi-terstruktur memungkinkan adanya tanggapan terbuka, sehingga memungkinkan para peserta untuk berbagi pandangan mereka dengan kata-kata mereka sendiri sambil memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai isu-isu tertentu.

3.2 Peserta

Penelitian ini melibatkan 10 informan yang dipilih secara purposif yang mewakili perspektif masyarakat yang beragam tentang sistem zonasi dan usulan penghapusannya. Para peserta termasuk orang tua yang terkena dampak penerimaan siswa baru, pendidik dan administrator sekolah yang memberikan wawasan tentang operasional sekolah, dan tokoh masyarakat yang mencerminkan keprihatinan yang lebih luas tentang kebijakan pendidikan. Kriteria pemilihan peserta difokuskan pada keahlian dan keterlibatan mereka dalam sistem pendidikan, untuk

memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi sistem zonasi dan potensi reformasinya.

3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan semi-terstruktur dengan 10 informan terpilih. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data kualitatif tentang topik-topik utama, termasuk persepsi terhadap sistem zonasi saat ini, reaksi terhadap usulan penghapusan sistem zonasi, kebijakan alternatif untuk penerimaan siswa baru, dan dampak potensial terhadap masyarakat. Para informan ditanya tentang kekuatan dan kelemahan kebijakan zonasi, dampaknya terhadap akses ke pendidikan berkualitas dan kesetaraan sosial, pendapat mereka tentang usulan penghapusan, dan saran untuk metode penerimaan siswa baru. Selain itu, mereka juga merefleksikan bagaimana penghapusan kebijakan zonasi dapat memengaruhi siswa, orang tua, guru, dan masyarakat luas. Wawancara dilakukan dalam suasana pribadi untuk memastikan kenyamanan dan keterbukaan, berlangsung selama 45-60 menit untuk memberikan tanggapan yang rinci.

3.4 Analisis Data

Data dari wawancara dianalisis menggunakan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) untuk mengidentifikasi pola atau tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Perangkat lunak NVIVO digunakan untuk mengatur dan memberi kode pada transkrip, mengidentifikasi tema-tema yang berulang. Proses ini melibatkan transkrip wawancara, pengkodean awal teks yang relevan, dan pengelompokan kode-kode yang sama ke dalam tema-tema yang lebih luas seperti “kesetaraan dalam pendidikan” dan “akses ke sekolah yang berkualitas.” Tema-tema ini ditinjau, disempurnakan, dan ditafsirkan untuk memahami pandangan masyarakat tentang penghapusan sistem zonasi dan potensi implikasinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Persepsi terhadap Sistem Zonasi Saat Ini

Tema pertama mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap sistem zonasi yang ada saat ini dalam proses PPDB. Sebagian besar informan mengungkapkan perasaan yang beragam, dengan aspek positif dan negatif yang ditonjolkan dalam tanggapan mereka.

1. Aspek Positif dari Sistem Zonasi

Beberapa peserta menyatakan bahwa sistem zonasi telah berkontribusi pada pemerataan akses pendidikan dengan memastikan anak-anak dapat bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumah mereka. Menurut salah satu orang tua (Informan 3),

“Sistem zonasi memudahkan kami untuk memasukkan anak ke sekolah, terutama bagi kami yang tinggal di daerah terpencil.”

Hal ini diamini oleh orang tua lainnya yang merasa bahwa sistem zonasi meminimalisir pengaruh status sosial-ekonomi dalam penerimaan siswa baru di sekolah, dan memastikan proses yang lebih adil. Para pendidik juga menyoroti bahwa sistem zonasi memungkinkan sekolah untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat setempat, yang mengarah pada

pemahaman yang lebih baik akan kebutuhan siswa dan dukungan yang lebih baik dari keluarga. Salah satu administrator sekolah (Informan 6) menyatakan,

“Dengan memiliki siswa yang berasal dari daerah yang sama, kami dapat lebih memahami tantangan yang mereka hadapi dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung.”

2. Aspek Negatif dari Sistem Zonasi

Namun, sejumlah besar informan juga mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang keterbatasan sistem zonasi. Salah satu isu utama yang muncul adalah adanya pembatasan pilihan pendidikan. Beberapa orang tua menyuarkan rasa frustrasi mereka terhadap minimnya pilihan, terutama di daerah-daerah di mana kualitas sekolah lokal dianggap tidak memadai. Seorang orang tua (Informan 1) menyebutkan,

“Jika sekolah di daerah saya tidak bagus, anak saya tidak punya pilihan lain. Saya merasa terjebak.”

Hal ini mencerminkan kekhawatiran bahwa sistem zonasi terkadang dapat menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan, terutama di daerah yang kurang terlayani. Kritik umum lainnya adalah kurangnya fleksibilitas dalam sistem ini. Menurut seorang pendidik (Informan 8),

“Sistem zonasi tidak mempertimbangkan kebutuhan individu siswa atau keluarga mereka. Ini adalah pendekatan satu ukuran untuk semua yang tidak cocok untuk semua orang.”

Beberapa orang tua, terutama yang tinggal di daerah dengan sekolah berkinerja lebih baik, merasa bahwa sistem ini secara tidak proporsional menguntungkan kelompok tertentu, sementara membatasi peluang bagi kelompok lainnya.

4.2 Sikap Terhadap Penghapusan Sistem Zonasi

Tema utama kedua adalah reaksi masyarakat terhadap usulan penghapusan sistem zonasi. Tanggapan yang diberikan sangat bervariasi, dengan beberapa informan menyatakan dukungannya terhadap perubahan tersebut, sementara yang lain lebih berhati-hati atau menentang.

1. Dukungan untuk Menghapus Sistem Zonasi

Beberapa peserta, terutama yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang lebih tinggi, menyatakan dukungannya untuk menghapuskan sistem zonasi, karena mereka percaya bahwa sistem ini akan memberikan lebih banyak pilihan dan kesempatan pendidikan bagi anak-anak mereka. Salah satu orang tua (Informan 2) menjelaskan,

“Jika sistem zonasi dihapuskan, kami akan memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih sekolah yang menawarkan program yang lebih baik untuk anak-anak kami.”

Kelompok ini memandang sistem zonasi sebagai hambatan untuk mengakses pendidikan yang lebih berkualitas, terutama di daerah perkotaan di mana sekolah swasta seringkali dianggap lebih bergengsi atau memiliki sumber daya yang lebih baik. Beberapa pendidik juga menyatakan dukungan mereka terhadap penghapusan sistem zonasi, dengan alasan bahwa sistem ini akan memungkinkan proses penerimaan siswa baru yang lebih kompetitif berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan lokasi geografis. Seorang pendidik (Informan 5) mengatakan,

“Penghapusan sistem zonasi dapat membuat kita lebih fokus pada prestasi dan prestasi akademik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.”

2. Kekhawatiran dan Penolakan terhadap Penghapusan Sistem Zonasi

Di sisi lain, terdapat sejumlah besar kekhawatiran terkait penghapusan sistem zonasi. Banyak informan, terutama yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang lebih rendah atau daerah pedesaan, khawatir bahwa penghapusan sistem zonasi akan memperparah ketidaksetaraan yang ada. Seorang tokoh masyarakat (Informan 7) mengatakan,

“Menghapus sistem zonasi dapat menyebabkan keluarga yang lebih kaya mendominasi sekolah-sekolah terbaik, dan membuat anak-anak yang lebih miskin tidak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas.”

Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran akan adanya segregasi sosial, di mana sekolah-sekolah dengan sumber daya yang lebih baik akan semakin sulit diakses oleh kelompok-kelompok yang kurang beruntung.

Informan lain khawatir bahwa penghapusan sistem zonasi akan menyebabkan penekanan yang berlebihan pada prestasi akademik sebagai satu-satunya penentu penerimaan siswa baru di sekolah, yang berpotensi meminggirkan siswa berkebutuhan khusus atau mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Seorang pendidik (Informan 6) berpendapat,

“Tanpa sistem zonasi, sekolah mungkin akan memprioritaskan siswa yang sudah sukses secara akademis, dan mengabaikan mereka yang membutuhkan bantuan ekstra.”

3. Perlunya Pendekatan yang Seimbang

Meskipun pendapat yang ada terbagi, banyak informan menekankan pentingnya mencari jalan tengah. Beberapa menyarankan agar reformasi sistem zonasi harus memastikan bahwa sistem tersebut tetap memprioritaskan akses bagi kelompok yang kurang beruntung, dan juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih sekolah. Seorang orang tua (Informan 9) menyatakan,

“Kami membutuhkan sistem yang memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang, tapi juga memberikan fleksibilitas dalam memilih sekolah.”

Hal ini menyoroti keinginan untuk pendekatan yang seimbang yang menggabungkan keuntungan dari sistem zonasi dengan manfaat dari pilihan pendidikan yang lebih banyak.

4.3 Saran dan Kekhawatiran Alternatif

Tema ketiga berfokus pada saran dan kekhawatiran alternatif yang disampaikan oleh para informan terkait proses penerimaan siswa baru di sekolah dan potensi dampak dari penghapusan sistem zonasi.

1. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Alternatif

Sejumlah peserta mengusulkan metode alternatif untuk memperbaiki proses penerimaan siswa baru di sekolah. Beberapa mengusulkan sistem hibrida yang menggabungkan zonasi dengan kriteria lain, seperti prestasi akademik, status sosial ekonomi, atau keterlibatan keluarga dalam masyarakat. Sebagai contoh, seorang pendidik (Informan 4) menyarankan,

“Mungkin kita dapat memiliki sistem dimana siswa di wilayah tertentu tetap mendapatkan prioritas, tapi mereka yang memiliki prestasi akademik atau kebutuhan finansial yang lebih baik juga dapat dipertimbangkan.”

Ide ini mencerminkan ketertarikan untuk menciptakan pendekatan yang lebih bernuansa dan inklusif dalam penerimaan siswa baru di sekolah.

Beberapa pihak merekomendasikan untuk memperkenalkan sistem undian untuk penerimaan siswa baru, yang akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk bersekolah di sekolah manapun, terlepas dari lokasi geografis mereka. Seorang orang tua (Informan 3) menyatakan,

“Sistem undian bisa jadi lebih adil, karena akan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, terlepas dari di mana mereka tinggal.”

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Semua Sekolah

Beberapa informan, khususnya pendidik, menekankan bahwa fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di semua sekolah, bukan hanya mengubah sistem penerimaan siswa baru. Salah satu pengelola sekolah (Informan 6) berpendapat, “Daripada mengubah sistem zonasi, kita seharusnya fokus untuk meningkatkan kualitas sekolah di semua wilayah, agar setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, di mana pun mereka tinggal.”

Pembahasan

Hasil studi ini mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap sistem zonasi dan usulan penghapusannya sangat kompleks dan beragam. Meskipun beberapa anggota masyarakat mendukung gagasan untuk memberikan pilihan sekolah yang lebih luas, ada kekhawatiran yang signifikan tentang potensi konsekuensi dari penghapusan sistem zonasi, terutama dalam hal kesetaraan sosial dan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem zonasi yang ada saat ini memiliki kekurangan, sistem ini memainkan peran penting dalam mempromosikan akses pendidikan untuk semua, terutama di daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang lebih sedikit.

Kekhawatiran yang disampaikan oleh para informan menekankan perlunya pertimbangan yang cermat terhadap potensi dampak dari setiap reformasi yang diusulkan. Menghapus sistem zonasi tanpa perlindungan yang memadai dapat memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah dan siswa dari daerah pedesaan. Pada saat yang sama, ada keinginan kuat untuk fleksibilitas yang lebih besar dan lebih banyak pilihan pendidikan, yang dapat dicapai melalui model penerimaan siswa baru yang bersifat hibrida atau alternatif.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang seimbang, yang menggabungkan elemen-elemen sistem zonasi dengan kriteria lain, seperti prestasi akademik atau faktor sosial-ekonomi, dapat menawarkan jalan ke depan yang dapat mengatasi kekhawatiran berbagai pemangku kepentingan. Pada akhirnya, tantangannya terletak pada menemukan solusi kebijakan yang menjamin keadilan dan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang atau lokasi mereka.

5. KESIMPULAN

Studi ini memberikan gambaran mendalam mengenai persepsi masyarakat terkait usulan penghapusan sistem zonasi dalam PPDB. Temuan penelitian ini menunjukkan perspektif yang kompleks dan beragam mengenai sistem yang ada saat ini dan usulan perubahannya. Sementara beberapa anggota masyarakat mendukung fleksibilitas peningkatan pilihan sekolah, banyak

anggota masyarakat yang menyatakan keprihatinannya tentang potensi dampak negatif terhadap akses ke pendidikan berkualitas bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Studi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang berbeda dalam penerimaan siswa baru di sekolah, yang menjamin keadilan sekaligus mengatasi kesenjangan kesempatan pendidikan. Model hibrida yang menggabungkan elemen-elemen zonasi dengan pertimbangan akademis dan sosio-ekonomi dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyeimbangkan fleksibilitas dan kesetaraan. Reformasi kebijakan di masa depan harus memprioritaskan kualitas pendidikan di seluruh sekolah dan akses pendidikan untuk semua siswa, memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam mengejar keunggulan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlinwibowo, J., Martono, S. F., Ulumudin, I., Waruwu, H., Yufriawati, Y., Murdiyningrum, Y., Fatima, G. N., & Khang, B. L. T. (2024). Changing images of favorite schools after the student admission system reform in Indonesia. *REID (Research and Evaluation in Education)*, 10(2), 199–213.
- Asson, S. (2024). Rezoning Educational Opportunities: The Relationship Between School Attendance Zone Boundary Changes and Access to Schools of Varying Quality. *Educational Policy*, 38(7), 1563–1607.
- Fiddini, P. F., Salsabila, F., & Latif, M. (2023). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi di Tengah Ketimpangan Kualitas Pendidikan Nasional. *MASALIQ*, 3(4), 706–717.
- Fu, W., & Talib, A. (2024). *Research on the Relationship between Urban and Rural Educational Resources Allocation and Educational Equity*. 2(8), 39–45.
- Hasbullah, & Anam, S. (2019). EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KABUPATEN PAMEKASAN. *REFORMASI*, 9, 112. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Hendrik, H., Nurrochsyam, M. W., Putra, R. P., & Murdiyningrum, Y. (2024). FROM ACADEMIC PROFICIENCY TO RELIGIOUS AFFILIATION: THE IMPACT OF SCHOOL ZONING POLICIES ON STUDENT DIVERSITY. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 27(1), 137–153.
- Hermawan, & Hakim, A. R. (2024). Enhancing Educational Services through the Implementation of the PPDB Zoning Policy in Indonesia. *International Journal of Religion*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:271033393>
- Laily, W. N., Safitri, D., & Sujarwo, S. (2024). Persepsi Orang Tua Pada Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru: Studi Deskriptif di SMP Negeri 7 Jakarta. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 59–69.
- Madjid, A. (2023). Dinamika Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipliner*, 86–94.
- Musadad, A. A., & Purwanta, H. (2023). Schools Zoning System in the New Student Admission in Indonesia: An Evaluative Study from Equitable Education Management Perspective. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 8(2), 415–427.
- Musyadad, F., Simangunsong, J., Evitasari, A. D., Saputra, E. C., & Trisnani, N. (n.d.). *Analysis of Educational Quality Equalization in Indonesia Through New Students' Admission by Zoning System*.
- Nurfakihiswara, I., Yudhistira, M. H., & Mauleny, A. T. (2024). The Impact of Zoning Policy Implementation and the Education Production Function in Improving the Quality of Senior High School Education. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:271068641>
- Rabbani, M. S., Chotimah, A. N., & Pasha, J. F. (2023). Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan. *Simpati: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Bahasa*, 1(3), 204–212.
- Rifai, A., & Imelda, I. (2024). Analysis Of Community Sentiment Towards The Implementation Of Zoning In New Student Admissions (PPDB) Using The Support Vector Machine (SVM) Algorithm. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 91–99.
- Rofidah, M. R., Wulandari, D. P., & Kurniawan, A. (2024). School Zone Mapping Based on Education and Population Data Using Genetic Algorithm. *2024 International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA)*, 1–6.
- Rupiarsieh, R. (2024). IMPLEMENTATION OF ZONING SYSTEM POLICY ON NEW STUDENTS' ADMISSION OF HIGH SCHOOL LEVEL IN BOJONEGORO REGENCY. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 22(01), 417–425.

- Sulistiyosari, Y., Wardana, A., & Dwiningrum, S. I. A. (2023). School zoning and equal education access in Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 12(2), 586–593.
- Susanto, R., Judijanto, L., Irsyad, I., & Fitri, S. A. (2024). The Impact of Implementing School Zoning Policy on Inequality of Access to Education at the Junior High School Level. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(8), 556–571.
- Tasyirifiah, T., & Pitaloka, A. F. (2023). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi terhadap Daya Saing Pelajar di Indonesia. *Al-Dyas*, 2(2), 381–391.